



KAJIAN IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN PAMONA TENGGARA KABUPATEN POSO

Herlan Lagantondo

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sintang Maroso, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel

Kata Kunci:

Keterbukaan dan
Akuntabilitas Pelayanan

Abstrak

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan Pamona Tenggara dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat masih belum seperti yang diharapkan. Pengaduan lainnya seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit dalam pengurusan, tidak terbuka, kurang informatif, dan terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta masih sering dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan. sering terjadi tumpang tindih yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, terjadi rangkap jabatan, juga pemborosan waktu dan dana, pertanggung jawaban pekerjaan yang seringkali terlambat dibuat, kurang mengutamakan kepentingan umum. dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dari uraian di atas, ada dua prinsip dasar *good governance* yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini yaitu asas keterbukaan dan asas akuntabilitas pelayanan. Dimana, kedua asas ini menurut peneliti sangat relevan dengan situasi dan masalah yang sedang terjadi di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso, dan kedua asas ini telah mengakomodir prinsip-prinsip *good governance* yang lain.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Informan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Perangkat Kecamatan 4 orang, Sekretaris Desa yang ada di 4 Desa di Kecamatan Pamona Tenggara, Tokoh Masyarakat 8 orang, dan anggota masyarakat 4 orang. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata informan menjawab bahwa selama ini kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara ditinjau dari implementasi asas keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan belum terealisasi dengan baik. Pegawai yang ada belum sepenuhnya dapat terbuka kepada masyarakat tentang informasi-informasi yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat serta tidak dapat merespons dengan baik setiap aspirasi dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Seksi-seksi dan Sub Bagian yang ada di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara belum sepenuhnya mampu menyusun pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dengan baik, dan masih terdapat pungutan-pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pegawai kepada pimpinan maupun masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi asas keterbukaan dan asas akuntabilitas pelayanan dalam kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso belum berjalan dengan baik.

PENDAHULUAN

Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan *good governance* tersebut adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping karena pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Sebab itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya *good governance*.

Otonomi daerah identik dengan bergesernya pusat-pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah, maka konsekuensi logis dari pergeseran tersebut harus dibarengi dengan meningkatnya penyelenggaraan *good governance* di daerah. Dalam rangka itu maka seluruh jajaran instansi pemerintah daerah dituntut untuk secara sungguh-sungguh menerapkan konsep atau prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing. Dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik dan benar, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja instansi – instansi pemerintah daerah yang selama ini masih belum terwujud secara maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kecamatan merupakan ujung tombak dari pemerintah daerah, yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintah secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Masyarakat perkotaan yang peradabannya sudah cukup maju, mempunyai kompleksitas permasalahan lebih tinggi dibandingkan pada masyarakat tradisional sehingga diperlukan aparatur pelayanan yang profesional. Kecamatan selama ini merupakan tingkatan wilayah administratif yang paling rendah, menjadi wilayah atau daerah kerja operasional daerah yang kedudukannya akan disejajarkan dengan dinas dan lembaga teknis daerah yang sama-sama sebagai perangkat daerah. Tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang semakin kompleks di tingkat kecamatan, menuntut adanya pendelegasian wewenang kepada perangkat kecamatan. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas kinerja perangkat kecamatan.

Mutu pelayanan publik di daerah Kabupaten Poso salah satunya juga ditentukan oleh

peran Pemerintah Kecamatan Pamona Tenggara. Masyarakat bergairah atau bersemangat dan sebaliknya tidak bergairah atau tidak bersemangat melaksanakan program pemerintah, dipengaruhi oleh kapasitas kinerja pemerintah yang mendorongnya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka setiap aparat pemerintah memerlukan tekad yang kuat agar bersedia melaksanakan pekerjaan dengan penuh semangat, gairah dan dedikasi yang tinggi, sehingga dapat memenuhi kapasitas kinerja yang diharapkan masyarakat seiring dengan besarnya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dalam upaya implementasi *good governance*.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan Pamona Tenggara dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat (seperti pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Perizinan, Surat Jalan, Akta Kelahiran dan sebagainya) masih belum seperti yang diharapkan. Pengaduan lainnya seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit dalam pengurusan, tidak terbuka, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, tidak proporsional, tidak profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih sering dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan.

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso menunjukkan bahwa terdapat 19 orang pegawai yang berstatus PNS dan 7 orang pegawai yang berstatus honorer, serta 18 orang pegawai yang berstatus sukarela. Pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi atau ditangani oleh aparat pemerintah Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso tersebut antara lain ; sering terjadi tumpang tindih yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, terjadi rangkap jabatan, juga pemborosan waktu dan dana, tidak adanya kepastian hukum kepada masyarakat akan waktu penyelesaian apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, pertanggung jawaban pekerjaan yang seringkali terlambat dibuat, kurang mengutamakan kepentingan umum. Dalam hal ini rekrutmen pegawai-pegawai ke dalam jabatan-jabatan tertentu ternyata belum selektif dan sistematis (tidak Profesional), kurang mantapnya

kinerja personal yang mengakibatkan penguasaan keterampilan dan pengetahuan di bidang tugas umumnya rendah. Perilaku aparatur sebagai pelayan publik yang kurang disiplin, tidak mau mengembangkan diri bagi perbaikan dan kemajuan instansi, dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Dari uraian di atas, ada dua prinsip dasar *good governance* yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini yaitu asas keterbukaan dan asas akuntabilitas pelayanan. Dimana, kedua asas ini menurut peneliti sangat relevan dengan situasi dan masalah yang sedang terjadi di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso, dan kedua asas ini telah mengakomodir prinsip-prinsip *good governance* yang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah implementasi *good governance* dalam kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu, bagaimana implementasi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso? Berdasarkan perumusan masalah ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana implementasi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara/publik, dalam upaya implementasi prinsip *good governance* di instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau rekomendasi bagi pemerintah Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso dalam rangka melayani masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik menuju tercapainya prinsip *good governance*.
- b. Sebagai bahan studi komparatif dan referensi pendukung bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

TEORI DAN KONSEP

Van Meter dan Van Hom (dalam Abdul Wahab 2008;65) merumuskan proses implementasi ini sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Menurut Sujatno (2007;39) pemerintahan yang baik ditandai dengan 3 (tiga) pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketiga elemen dasar tersebut ialah :

1. Transparansi

Transparansi adalah upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, Koran, radio serta televisi. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Indikator dari proses transparansi yang berjalan baik yaitu bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah upaya mendorong setiap warga negara untuk mempergunakan hak menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar rakyat dapat menyalurkan partisipasi aktifnya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*).

Menurut Pasolong (2010;175) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Ayat 5 dan 9, disebutkan bahwa kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Menurut sifatnya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan situasi dan kondisi kantor dan aparatur pemerintah kecamatan pamona tenggara, serta menjelaskan bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam kinerja

organisasi pemerintah di kantor kecamatan pamona tenggara. Menurut Nawawi (2003;63) metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Informan penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Kecamatan, Perangkat Kecamatan 4 Orang, Sekretaris Desa, 4 Orang, Tokoh Masyarakat 8 Orang, Anggota Masyarakat 4 Orang. Total Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 22 Informan. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*Purposive sampling*). Menurut Subagyo, 2011;31) *purposive* adalah cara pengambilan sampel sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus di penuhi sebagai sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu dianalisis karena maknanya harus diketahui, analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinu dari awal sampai akhir penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu, reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan sehubungan dengan keterbukaan informasi publik di kecamatan pamona tenggara, diperoleh data dan informasi bahwa selama ini aparatur pemerintah kecamatan pamona tenggara sangat kurang memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten poso dengan pemerintah kecamatan, serta kurangnya fasilitas kantor yang mendukung untuk mempermudah mengakses informasi-informasi terbaru, dan tidak adanya kendaraan dinas yang dibutuhkan oleh aparatur pemerintah kecamatan pamona tenggara, sehingga seringkali desa-desa yang terletak jauh dengan ibu kota kecamatan terlambat dalam menerima informasi karena tidak bisa dijangkau

oleh aparaturnya pemerintah kecamatan pamona tenggara.

Dari hasil penelitian diperoleh juga informasi bahwa selama ini aparaturnya pemerintah kecamatan pamona tenggara tidak terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dikecamatan, sehingga keputusan yang dibuat sering mengalami kendala karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat.

Pemerintah daerah kabupaten poso dituntut untuk mampu menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam mengakses informasi-informasi terbaru, agar masyarakat bisa dengan cepat mengetahui perkembangan informasi yang berhubungan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan sangat mendukung terciptanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pemerintah juga harus tanggap dalam menanggapi segala aspirasi dari masyarakat. masih adanya praktek-praktek KKN dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, seperti masih adanya pungutan-pungutan yang tidak jelas sehingga masyarakat merasa dibohongi, dan tidak adanya ketegasan dari pimpinan kepada staf yang melakukan praktek-praktek tersebut.

Masalah di atas muncul karena disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang peraturan-peraturan pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten poso ke wilayah-wilayah kecamatan dan pedesaan, kurangnya kemauan pribadi dari aparaturnya pemerintah yang ada untuk mengakses informasi-informasi terbaru tentang peraturan-peraturan pemerintah, dan kurangnya sumber daya manusia dari aparaturnya pemerintah yang ada di kecamatan pamona tenggara itu sendiri.

Pemerintah daerah kabupaten poso dituntut untuk proaktif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang baru sampai pada tingkat kecamatan dan pelosok-pelosok desa yang ada di wilayah kabupaten poso, sehingga masyarakat boleh mengetahui perkembangan yang ada dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. masih terjadi dalam setiap pengurusan kebutuhan masyarakat yang melibatkan masyarakat banyak pada waktu yang bersamaan

aparaturnya yang ada lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan atau kekeluargaan dengan mereka untuk terlebih dahulu dilayani, dalam memberikan informasi sehubungan dengan adanya bantuan-bantuan sosial hanya mengutamakan orang-orang di dekat mereka/keluarga, tidak akomodatif dalam menerima aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan peningkatan kinerja aparaturnya pemerintah kecamatan pamona tenggara.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, terlihat bahwa aparaturnya pemerintah kecamatan pamona tenggara tidak aspiratif dalam merespon tuntutan masyarakat yang berhubungan dengan peningkatan kinerja mereka. Seperti untuk datang tepat waktu di kantor, selama jam kerja tetap berada di kantor, lebih mengutamakan kepentingan keluarga dari pada tugas di kantor, sehingga setiap urusan-urusan yang dilakukan oleh masyarakat di kantor kecamatan pamona tenggara mengalami keterlambatan dan tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini terjadi disebabkan ketidaktegasan dari camat terhadap stafnya untuk menerapkan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Dengan demikian, dalam sebuah negara demokrasi aparaturnya pemerintah dituntut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat pada umumnya dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam proses pengambilan keputusan, aparaturnya pemerintah juga harus akomodatif dalam menerima aspirasi masyarakat agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa selama ini dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparaturnya pemerintah di kantor kecamatan pamona tenggara belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Salah contoh yang terjadi selama ini, masih ditemukan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban seksi-seksi dan sub bagian tidak terstruktur dan tidak tepat waktu dalam membuat dan memasukkan laporan kepada pimpinan, sehingga terkadang pimpinan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah kecamatan pamona tenggara, masih terjadi pungutan-pungutan dalam pengurusan administrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pimpinan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang mekanisme penyusunan laporan pertanggung

jawaban kegiatan dan keuangan dari aparatur pemerintah di kantor kecamatan pamona tenggara, kurangnya pengawasan pimpinan dalam hal ini camat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur yang ada.

Dengan demikian, akuntabilitas pelayanan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah dapat memberikan sumbangsi positif dalam menilai kinerja aparatur dalam sebuah organisasi pemerintah, sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai data dan informasi yang diperoleh pada waktu melakukan penelitian, terlihat bahwa selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kecamatan pamona tenggara sebagian besar hanya menuntut hak mereka dari pada memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini nampak pada adanya aparatur yang hanya menginginkan untuk dapat dipromosikan dalam jabatan tertentu, tetapi tidak mau dan tidak mampu untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan mereka melalui studi lanjut, pelatihan, kursus yang akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kinerja mereka menjadi lebih baik. Maka, orang-orang yang sekarang ini berada di jabatan-jabatan struktural tidak dapat memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Hal di atas muncul karena sesuai dengan fakta yang diperoleh peneliti, pemahaman yang muncul pada sebagian besar aparatur pemerintah di kantor kecamatan pamona tenggara selama ini adalah kurangnya kemauan aparatur untuk mengembangkan pengetahuan mereka seperti mengikuti studi lanjut. Oleh karena adanya pemahaman atau anggapan bahwa untuk apa sekolah setinggi langit, toh sudah akan segera pensiun, lebih baik menyekolahkan anak-anak saja.

Dengan demikian, setiap aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan tidak hanya mengutamakan dan menuntut hak untuk mendapatkan jabatan dan upah yang besar, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban mereka untuk lebih lagi menambah wawasan dan keterampilan masing-masing yang akan menunjang kinerja mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya tentang implementasi asas keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan dalam kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso, maka dapat di buat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Informasi mengenai bantuan-bantuan sosial baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak di informasikan dan di sosialisasikan secara cepat dan terbuka kepada masyarakat, dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang melibatkan masyarakat banyak pada waktu atau hari yang sama seringkali lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan atau kekeluargaan dengan aparatur pemerintah yang ada di kantor kecamatan pamona tenggara seperti pengurusan KTP, selama ini sering terjadi pada jam kerja terkadang aparatur pemerintah kecamatan terlambat masuk kantor dengan alasan urusan keluarga sehingga terkadang masyarakat mengeluh karena urusan mereka tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
2. Dalam penyusunan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas seksi-seksi dan sub bagian yang ada di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara belum sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, khusus bagi aparatur yang mengelola keuangan kantor dan kegiatan-kegiatan yang dipungut biaya seperti petugas pencatatan sipil, pertanahan tidak membuat pelaporan dengan baik kepada pimpinan, adanya pungutan-pungutan yang tidak jelas sehingga masyarakat merasa tidak mendapat keadilan, dalam proses pengurusan surat-surat penting seperti surat ijin, KTP dan surat jalan seringkali masyarakat merasa tidak memiliki kepastian (waktu dan biaya) untuk penyelesaian urusan tersebut, masih adanya praktek birokrasi yang berbelit-belit oleh karena sering terjadi rangkap jabatan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi yang ada di kantor kecamatan pamona tenggara kabupaten poso yang disebabkan oleh kekosongan jabatan tertentu dan kepala-kepala seksi yang tidak memahami tupoksi mereka masing-masing sehingga pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakat kurang baik.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dinilai perlu untuk mengusulkan beberapa saran atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan maupun kontribusi positif sekaligus solusi bagi perbaikan, penataan, dan peningkatan implementasi prinsip *good governance* dilihat dari asas keterbukaan dan asas akuntabilitas pelayanan dalam kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Maka hal-hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Aparatur Pemerintah Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso harus proaktif dalam mengakses informasi-informasi yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat baik informasi dari Pemerintah Pusat ataupun informasi dari Pemerintah Daerah, serta Aparatur Pemerintah Kecamatan Pamona Tenggara dituntut untuk lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso perlu mengadakan pendidikan, pelatihan, pembinaan guna meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Kecamatan Pamona Tenggara dalam menunjang pelaksanaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsinya, serta Pemerintah Kecamatan Pamona Tenggara harus mampu membuat ketentuan yang baku tentang besaran biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengurus surat-surat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat serta dapat di pertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso perlu melakukan promosi jabatan untuk mengisi jabatan yang kosong di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara terhadap orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jabatan atau bidang yang akan ditempati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab,S, 2008, *Analisis kebijaksanaan*, PT.Bumu Aksara. Jakarta
- Sujatno, Adi, 2007, *Moral dan Etika Kepemimpinan merupakan landasan ke arah pemerintahan yang baik (Good Governance)*, Team 4AS. Jakarta
- Nawawi, Hadari, 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*, CV. Alfabeta. Bandung

Subagyo.J.P, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*.PT. Rineka Cipta. Jakarta

DOKUMEN - DOKUMEN

- Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), 2010. Fokusmedia. Bandung
- Peraturan Bupati Poso Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Poso.